



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
**UNIT KERJA** : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ANDY NUR KARENDRA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **793015**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. **1.455.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/180 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
2. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
4. Tanah Seluas 325 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 165.500.000
5. Tanah Seluas 185 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/51 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 635.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. **268.000.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY MATIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. **110.000.000**

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. **1.833.500.000**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.833.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.